



RENCANA KERJA (RENJA)

Tahun 2021

SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-3708 Tahun 2020
Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kami Panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (renja) Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2021.

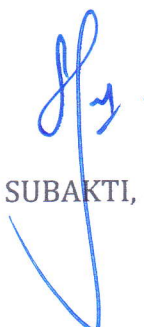
Rencana Kerja (Renja) yang disusun ini merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD sampai dengan akhir tahun anggaran yang dirumuskan secara akuntabel dan transparan.

Rencana Kerja (Renja) ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan Anggaran tahun 2021.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna penyempurnaan Renja perubahan di masa yang akan datang.

Pontianak, 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK


HJ. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	(i)
DAFTAR ISI	(ii)
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu dan capaian Renstra.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	21
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.....	22
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN	28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2 Tujuan dan sasaran Renja.....	28
3.3 Program dan kegiatan.....	29
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	38
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	38
BAB V : PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk tahun 2021 dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Kerja (Renja) ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Kerja dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kota Pontianak ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Sekretariat DPRD Kota Pontianak saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kota Pontianak dan stakeholder lainnya yang berada di kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan dan peran strategis. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan dengan memperhatikan kepentingan pelayanan anggota DPRD dan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja ini adalah

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 149);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
21. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 57);

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Pontianak terus berupaya menyusun rencana tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renja guna mendukung pencapaian Visi dan Misi. Untuk itu maka faktor keberhasilan dari kegiatan tahun-tahun lalu maupun kegagalan harus dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2022 dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kota Pontianak kedepan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen yang ditunjukkan melalui

kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh aparatur Sekretariat DPRD Kota Pontianak, sebagaimana yang dituangkan dalam penetapan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, bahwa Tugas Pokok Sekretaris DPRD Kota Pontianak adalah : *"Merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah"*

Berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan Sekretaris DPRD Kota Pontianak dilandasi peraturan Perundang-Undangan yang bersumber pada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
3. Permendagri No. 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 Tentang kedudukan, struktur organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRd Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peratruran DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pontianak;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dimaksudkan untuk :

- a) Memberikan pedoman dan arah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk satu tahun kedepan.
- b) Dasar untuk memotivasi kerja dan menyamakan persepsi serta pemahaman terhadap tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- c) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan Misi Walikota Pontianak sebagai dasar penyusunan laporan kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Walikota.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah :

- a) Untuk melihat sejauh mana peranan penting keberadaan serta posisi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b) Memberikan Kontribusi dalam penataan Administrasi Kesekretariatan DPRD dalam melaksanakan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD
- 3.3 Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD

Pelaksanaan Rencana kerja dan capaian Renstra Sekretariat DPRD pada tahun 2019 tertuang dalam program kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2019 dapat dilihat pada uraian berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

Meliputi Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini berupa belanja materai 6.000 dan 3.000 yang dipergunakan untuk administrasi kantor, dialokasikan dana sebesar Rp. 33.765.000,- dengan realisasi Rp. 27.300.000,- (80,85%)

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini terealisasi berupa Pembayaran rekening telepon, listrik dan air pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Pontianak dan rumah dinas ketua untuk 12 bulan.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 580.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 429.224.459,- (74 %).

c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa jasa kebersihan kantor, dimana jumlah personil yang dipergunakan sebanyak 10 orang dan berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dilaksanakan selama 12 bulan.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 471.732.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 422.285.300,- (89,52 %)

d) Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian alat-alat tulis kantor dan operasional printer untuk kebutuhan Sekretariat DPRD selama 12 bulan.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 271.667.150,- dengan realisasi sebesar Rp 265.550.000,- (97,75 %).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan.

e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan barang-barang cetakan seperti blanko SPPD, Kop DPRD dan Sekretariat DPRD, amplop dinas dan lain-lain serta belanja penggandaan / foto copy untuk 12 bulan.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 267.406.700,- dengan realisasi sebesar Rp 251.688.70000,- (94,12 %).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan alat-alat listrik seperti lampu, saklar, kabel listrik dan lain-lain.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 52.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.077.500,- (71,30%)

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini terealisasi berupa adanya bahan bacaan seperti surat kabar dan majalah untuk keperluan di Sekretariat DPRD.
Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 94.920.000 dengan realisasi sebesar Rp. 92.320.000,- (97,26%)

h) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini terealisasi berupa *penyediaan makanan dan minuman*, dalam rangka memfasilitasi makanan dan minuman dalam kegiatan atau rapat-rapat yang dilaksanakan di DPRD Kota Pontianak, sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Pontianak dan juga adanya kunjungan kerja dari luar untuk 1 (satu) tahun.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 501.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 272.730.000,- (54,34 %)

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

i) Rapat-rapat Konsultasi & Koordinasi Keluar Daerah

Kegiatan terealisasi berupa belanja perjalanan dinas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD dan biaya perjalanan dinas Sekretariat DPRD untuk mendampingi anggota DPRD dalam pelaksanaan tinjauan lapangan, study banding dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 8.515.522.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.751.805.436,79,- (91,03 %).

j) Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang, gaji dan belanja pakaian supir pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 601.569.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 520.163.400,- (86,47%).

k) Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Keuangan

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola kegiatan serta belanja perangko. Materai dan benda pos lainnya pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 536.040.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 509.680.000,- (95,08%).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

l) Penyediaan Kegiatan Olahraga

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 30.900.000,- namun kegiatan ini tidak direalisasikan.

m) Penyediaan Kebersihan Rumah Jabatan

Kegiatan ini terealisasi berupa gaji tenaga kebersihan, belanja pakaian serta belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk kebersihan rumah jabatan.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 188.856.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 171.352.000,- (90,73 %)

n) Penyediaan Fasilitas Kegiatan-kegiatan Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa belanja souvenir seperti plakat dan kerajinan daerah serta untuk belanja sewa diantaranya sewa sound system, sewa tenda serta sewa meja kursi selama satu tahun.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 216.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 180.085.000,- (83,23 %).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan.

o) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Rumah Jabatan

Kegiatan ini tercukupinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan rumah jabatan selama 1 tahun.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 32.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.777.500,- (39,44%)

p) Penyediaan Jasa Pengamanan kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa adanya pengamanan di gedung kantor dan rumah jabatan ketua DPRD selama 12 bulan, dimana jumlah personil yang dipergunakan sebanyak 14 orang (8 orang = kantor, 6 orang = rumah jabatan) kegiatan ini masih menggunakan Pihak ketiga.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 797.279.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 649.796.900,- (81,50 %).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan

q) Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD Kota Pontianak

Kegiatan ini terealisasi berupa belanja antisipasi pengamanan, belanja makan dan minum kegiatan, belanja jasa narasumber atau tenaga ahli dan belanja jasa konsultasi hukum selama satu tahun.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 376.140.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 292.770.000,- (77,84%).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan.

f) Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD

Kegiatan ini terealisasi berupa adanya fasilitasi kegiatan rapat.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 1.000.910.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 856.960.000,- (85,22 %).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Meliputi Kegiatan :

a) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 131.920.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 129.847.000,- (98,43%).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

b) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini terealisasi berupa service/perawatan rutin/berkala, pengadaan/penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak (BBM), pelumas kendaraan dinas/operasional untuk 1 tahun.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 366.212.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 227.087.938,- (62,01 %)

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan rumah Jabatan/Dinas

Kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan untuk 1(satu) tahun.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 27.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.109.3000,- (30,03 %)

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

d) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 21.351.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.240.000,- (29,23 %).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

e) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeuler

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 16.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.326.100,- (98,95 %)

f) Pemeliharaan sistem dan Program Komputer/ Jaringan/Internet

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 46.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.895.000,- (69,34 %).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

g) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan jaringan listrik dan telepon dan lain-lain.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 185.040.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 183.062.642,- (98,93 %).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

h) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 122.540.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 116.241.721,- (94,86%).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

i) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 313.223.080,- dengan realisasi sebesar Rp. 258.805.250,- (82,63 %).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Meliputi Kegiatan :

a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini terealisasi berupa pengiriman staf Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 96.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 68.485.600,- (71,04 %).

4. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Meliputi Kegiatan :

a) Penyusunan Rencana Kerja

Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2020.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 9.500.000,- , dengan realisasi sebesar Rp. 9.500.000,- (100%).

b) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan laporan diantaranya Lakip, LPPD dan LkPj.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 24.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.190.000,- (86,49%).

Hal ini dikarenakan untuk kegiatan SPIP tidak dilaksanakan

c) Penyusunan Evaluasi dan Analisis Jabatan

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 10.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.500.000,- (100%).

b) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 24.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.000.000,- (100%).

5. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR

Meliputi Kegiatan :

a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Kegiatan ini terealisasi berupa :

- ❖ Pakaian Sipil Harian (PSH) Anggota DPRD sebanyak 90 stel
- ❖ Pakaian Dinas Harian (PDH) Anggota DPRD sebanyak 45 stel
- ❖ Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pegawai Sekretariat sebanyak 45 stel
- ❖ Pakaian Sipil Resmi (PSR) Anggota DPRD sebanyak 46 stel.
- ❖ Pakaian Batik Tradisional sebanyak 45 stel

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 357.390.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 353.480.000,- (98,91 %).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

6. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN

Meliputi Kegiatan :

a) Penyusunan Laporan Keuangan

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan Laporan Rencana Kerja Anggaran (RKA), laporan prognosis dan realisasi keuangan semester tahun 2021.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 13.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.950.000,- (97%).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA

a) Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) semester I dan II.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.300.000,- (62%).

8. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI

Meliputi kegiatan :

a) Penyusunan Data dan Profil OPD

Pada Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 14.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.760.000,- (99,60%).

b) Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD

Kegiatan ini terealisasi berupa adanya dokumen tentang kegiatan anggota DPRD Kota Pontianak.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 752.425.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 744.780.000,- (98,98 %).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

c) Penyusunan Buku Selayang Pandang

Pada Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 46.540.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.040.000,- (96,78%).

d) Rekam Jejak Pengabdian Anggota DPRD

Pada Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 58.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 56.440.000,- (96,58%).

9. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

a) Pengelolaan website

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 35.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.400.000,- (100 %).

10. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Meliputi Kegiatan :

a) Fasilitas Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Pontianak

Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan kunjungan anggota DPRD ke daerah pemilihan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat di wilayah pemilihan.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 2.729.520.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.690.220.000,- (98,56%).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

b) Fasilitas Pengkajian Perda

Kegiatan ini terealisasi berupa honor narasumber dan jasa konsultasi perencanaan.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 208.356.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 132.540.000,- (63,61 %).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

c) Kerjasama Adeksi dan Asdeksi

Kegiatan ini berupa iuran.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 32.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.000.000,- (95,38%).

d) Pelatihan Legal Drafting Peraturan Daerah

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 433.515.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 386.739.190,- (89,21%).

e) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD Kota Pontianak

Kegiatan ini terealisasi berupa pengiriman Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak pada diklat dan kegiatan pengembangan wawasan

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 2.841.716.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.433.833.594,- (85,65%).

f) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 224.140.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 224.140.000,- (100%).

g) Pelantikan /Pengambilan Sumpah dan Ramah Tamah Anggota DPRD

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 329.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 270.450.000,- (82,07%).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Output pelayanan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD terdiri dari

1) Penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD menyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD baik sebagai perencanaan penyusunan legislasi daerah, fungsi pengawasan serta tugas-tugas dan fungsi DPRD lainnya.

2) Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD

Sekretariat DPRD memfasilitasi perencanaan kebutuhan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat DPRD.

4) Pengadaan & Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memfasilitasi pengadaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD / alat-alat kelengkapan DPRD

5) Pelayanan ketatausahaan Sekretariat DPRD

Berupa pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan umum lainnya.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tentang Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang DPRD .

Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD diperlukan Peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
- b) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- c) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD
- d) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Peningkatan Kualitas perencanaan dalam penyusunan / perancangan peraturan daerah, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD

IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGI

Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan tahunan ke depan Renja Sekretariat DPRD Kota Pontianak, dengan menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

A. Identifikasi Faktor Strategi Eksternal

1. Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain :
 - a) Ketersediaan anggaran yang cukup memadai sehingga memungkinkan bagi organisasi untuk terus berinovasi dalam penyusunan program dan kegiatan guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
 - b) Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan SDM.
 - c) Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka menunjang kinerja DPRD
 - d) Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuka peluang pengembangan aplikasi teknologi informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2. Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain :
 - a) Manajemen pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi kedewanan yang belum terkelola dengan baik dan professional, sehingga belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat kota Pontianak.
 - b) Peraturan perundang-undangan sebagai instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sering mengalami perubahan dan tidak dapat diprediksi.
 - c) Tingginya intensitas kegiatan DPRD yang menyebabkan tuntutan pelayanan yang semakin meningkat, tanpa mempertimbangkan tahapan penatausahaan keuangan dan akuntabilitas kinerja (anggaran berbasis kinerja).

B. Identifikasi Faktor Strategi Internal

1. Kekuatan yang bisa digunakan, antara lain :
 - a) Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

- b) Adanya forum Asosiasi Sekretariat DPRD Kab/ Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) sebagai wadah bertukar informasi antar Sekretariat DPRD seluruh Indonesia.
- c) Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas yang cukup memadai.

2. Kendala/kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain :

- a) Kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan pun dirasa belum optimal
- b) Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal
- c) Struktur organisasi belum mengacu pada Permendagri 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang,tantangan/ancaman diperoleh strategi alternative sebagai berikut :

1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman;
- 4.Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis sederhana, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada, namun pengaruh kelemahan maupun ancaman perlu di perhatikan.

Isu-isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan

lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga Sistem Pendukung DPRD, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun ke depan adalah :

1. Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan beban tugas dan tanggung jawab yang begitu besar maka setiap anggota DPRD dituntut untuk memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi untuk menunjang kinerja lembaga DPRD yang berkualitas.

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah merupakan program utama yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak guna menunjang capaian kinerjanya yaitu Pembahasan Program Legislatif Daerah (Prolegda) dan Pengesahan Peraturan Daerah (Perda). Dengan kegiatan pendukung antara lain :

1. Fasilitasi Rapat-rapat DPRD
2. Pelatihan Legal Drafting Peraturan Daerah
3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Fasilitasi Kegiatan Reses
5. Fasilitasi Pengkajian Perda
6. Sosialisasi Raperda Inisiatif
7. Kerjasama ADEKSI dan ASDEKSI

2. Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur

Kelancaran pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tentu tidak terlepas dari peran Sekretariat DPRD sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fasilitasi dan memberikan bantuan administrative serta teknik operasional guna menunjang keberhasilan tugas-tugas DPRD Kota Pontianak. Untuk itu tentunya dibutuhkan pula tenaga sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu dibutuhkan pula ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai guna menunjang aktifitas kerja.

Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk menyikapi isu tersebut yaitu Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program Peningkatan disiplin dan kinerja aparatur, Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan kantor, program peningkatan dan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan Program peningkatan dan pengembangan system pelaporan keuangan.

3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Sebagai lembaga legislative yang memperjuangkan aspirasi rakyat dan beranggotakan para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Kota Pontianak, maka Lembaga DPRD memiliki tanggung jawab moral kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak untuk memperjuangkan kesejahteraannya.

Masyarakat berhak tahu apa dan bagaimana para wakilnya bekerja. Ditambah lagi dengan era keterbukaan public yang menuntut Sekretariat

DPRD untuk mampu menjadi jembatan penghubung antara DPRD dengan seluruh masyarakat Kota Pontianak, menyediakan wadah informasi yang handal dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta memfasilitasi penyampaian aspirasi, demo dan pengaduan masyarakat.

Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk menyikapi isu tersebut yaitu Program peningkatan pelayanan prima, program Pengembangan system informasi dengan kegiatan Pengelolaan website dan Pembuatan Sistem Informasi, serta Program pengembangan data/ informasi dengan kegiatan pendukungnya adalah Penyusunan data dan profil Perangkat Daerah, Dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD, Penyusunan buku selayang pandang dan Rekam jejak pengabdian anggota DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat DPRD sebagai Penyedia Fasilitas DPRD dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sebagai lembaga Legislatif terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat, sehingga peranan DPRD menjadi sangat luas dan penting bagi pembangunan Daerah khususnya Kota Pontianak.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Mengacu kepada visi sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai penjabaran dari setiap misi, dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun.

Adapun tujuan Renja Sekretariat DPRD tahun 2021 adalah :

Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan utama yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk satu tahun kedepan meliputi program, kegiatan, yang akan dilaksanakan. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Renstra Sekretariat DPRD dan RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024. Program, kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2021

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2021

Dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kota Pontianak

Sekretariat DPRD Kota Pontianak

No	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Prakiraan maju rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang dilaksanakan tepat waktu		100%	13.543.232.800			100%	14.851.122.437
1.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi		100%	431.900.900	APBD Kota		100 %	512.759.900
1.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen program pembentukan peraturan daerah	Set.DPRD	1 dokumen	2.235.000	APBD Kota		1 dokumen	2.235.000
1.1.2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah rancangan perda yang dibahas	Set.DPRD	10 Raperda	11.009.000	APBD Kota		10 raperda	11.009.000
1.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah rancangan perda yang dikaji	Set.DPRD	5 raperda	80.859.000	APBD Kota		5 raperda	161.718.000
1.1.4	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik yang disusun	Set.DPRD	2 dokumen	334.078.000	APBD Kota		2 dokumen	334.078.000

Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2021

1.1.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang dievaluasi	Set.DPRD	1 dokumen	3.719.900	APBD Kota		1 dokumen	3.719.900
1.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen kebijakan anggaran		5 dokumen	17.470.000	APBD Kota		5 dokumen	17.470.000
1.2.1	pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPA	Set. DPRD	1 dokumen	3.340.000	APBD Kota		1 dokumen	3.340.000
1.2.2	pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	Set. DPRD	1 dokumen	3.340.000	APBD Kota		1 dokumen	3.340.000
1.2.3	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen APBD	Set.DPRD	1 dokumen	4.110.000	APBD Kota		1 dokumen	4.110.000
1.2.4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen APBD Perubahan	Set.DPRD	1 dokumen	3.340.000	APBD Kota		1 dokumen	3.340.000
1.2.5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD	Set.DPRD	1 dokumen	3.340.000	APBD Kota		1 dokumen	3.340.000
1.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi		100%	57.105.000			100%	55.305.000
1.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat: komisi I	Set.DPRD	60 kali	10.710.000	APBD Kota		60 kali	10.710.000
1.3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat: komisi II	Set.DPRD	60 kali	10.710.000	APBD Kota		60 kali	10.710.000
1.3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat: komisi IV	Set.DPRD	60 kali	10.710.000	APBD Kota		60 kali	10.710.000

Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2021

1.3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah rapat: Komisi III	Set.DPRD	60 kali	10.710.000	APBD Kota		60 kali	10.710.000
1.3.5	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan	Jumlah rapat: pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI	Set.DPRD	1 kali	2.955.000	APBD Kota		1 kali	2.955.000
1.3.6	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah	Jumlah rapat: Pansus LKPJ yang dilaksanakan	Set.DPRD	20 kali	11.310.000	APBD Kota		20 kali	9.510.000
1.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas		100%	2.910.375.000	APBD Kota		100%	3.410.375.000
1.4.1	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah kegiatan bimbingan teknis DPRD		6 kegiatan	2.144.835.000	APBD Kota			2.644.835.000
1.4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jangka waktu fasilitasi publikasi dan dokumentasi dewan	Set.DPRD	12 bulan	465.000.000	APBD Kota		12 bulan	465.000.000
1.4.3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan	Set.DPRD	7 orang	294.000.000	APBD Kota		7 orang	294.000.000
1.4.4	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja DPRD	Set.DPRD	1 dokumen	6.540.000	APBD Kota		1 dokumen	6.540.000
1.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi		100%	4.107.500.000	APBD Kota		100%	4.107.500.000
1.5.1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD	Set.DPRD	1 dokumen	3.340.000	APBD Kota		1 dokumen	3.340.000

Rencana Kerja (Ranja)
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2021

1.5.2	Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses		3 kegiatan	4.104.160.000	APBD Kota		3 kegiatan	4.104.160.000
1.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan kode etik		100%	35.969.900	APBD Kota		100%	35.969.900
1.6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD yang dievaluasi	Set.DPRD	1 dokumen	3.719.900	APBD Kota		1 dokumen	3.719.900
1.6.2	Pengawasan kode etik DPRD	Jumlah rapat badan kehormatan yang difasilitasi	Set.DPRD	12 kali	32.250.000	APBD Kota		12 kali	32.250.000
1.7	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas DPRD yang difasilitasi		100%	5.982.912.000	APBD Kota		100%	6.711.742.637
1.7.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi	Set.DPRD	12 kegiatan	4.703.910.000	APBD Kota		12 kegiatan	5.203.910.000
1.7.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD	Set.DPRD	1 dokumen	130.020.000	APBD Kota		1 dokumen	130.020.000
1.7.3	Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Jumlah rapat banmus yang difasilitasi	Set.DPRD	12 kali	44.760.000	APBD Kota		12 kali	44.760.000
1.7.4	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Set.DPRD	20 kegiatan	1.104.222.000	APBD Kota		20 kegiatan	1.333.052.637
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		100%	41.007.758.563	APBD Kota		100%	40.687.177.563
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		9 dokumen	7.758.000			6 dokumen	28.032.000

Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2021

2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Set.DPRD	2 dokumen	2.000.000	APBD Kota		2 dokumen	2.000.000
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Set.DPRD	4 dokumen	2.758.000	APBD Kota		4 dokumen	11.032.000
2.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Set.DPRD	3 dokumen	3.000.000	APBD Kota		3 dokumen	15.000.000
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah		12 bulan	7.032.137.333			12 bulan	7.042.157.500
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Set.DPRD	12 bulan	6.412.874.833	APBD Kota		12 bulan	6.416.000.000
2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Set.DPRD	12 bulan	57.200.000	APBD Kota		12 bulan	57.200.000
2.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Set.DPRD	12 bulan	560.683.500	APBD Kota		12 bulan	560.683.500
2.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Eularan./Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Set.DPRD	2 dokumen	1.379.000	APBD Kota		2 dokumen	8.274.000
2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		5 unit	56.000.000			5 unit	56.000.000

Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2021

2.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diasuransikan	Set.DPRD	5 unit	56.000.000	APBD Kota		5 unit	56.000.000
2.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya		35 orang	151.300.800	APBD Kota		35 orang	176.300.800
2.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Set.DPRD	74 stel	46.000.000	APBD Kota		74 stel	46.000.000
2.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal	Set.DPRD	5 orang	105.300.800	APBD Kota		5 orang	130.300.800
2.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bulan	2.115.754.200			12 bulan	1.726.504.100
2.5.1	Fenyeediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Set.DPRD	12 bulan	74.400.000	APBD Kota		12 bulan	74.400.000
2.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Set.DPRD	12 bulan	152.740.000	APBD Kota		12 bulan	152.740.000
2.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga	Set.DPRD	12 bulan	201.600.000	APBD Kota		12 bulan	186.600.000
2.5.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	Set.DPRD	12 bulan	867.350.000	APBD Kota		12 bulan	697.350.000

Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2021

2.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan	Set.DPRD	12 bulan	136.840.000	APBD Kota		12 bulan	105.339.900
2.5.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Set.DPRD	12 bulan	75.798.600	APBD Kota		12 bulan	75.798.600
2.5.6	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Set.DPRD	3.000 orang	347.750.000	APBD Kota		3.000 orang	150.000.000
2.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Set.DPRD	12 bulan	259.275.600	APBD Kota		12 bulan	284.275.600
2.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		39 unit	862.000.000			39 unit	597.500.000
2.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	Set.DPRD	12 unit	49.340.000	APBD Kota		12 unit	49.340.000
2.6.2	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Set.DPRD	27 unit	812.660.000	APBD Kota		27 unit	548.160.000
2.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		12 bulan	2.501.569.800	APBD Kota		12 bulan	2.732.849.800
2.7.1	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	Set.DPRD	12 bulan	496.500.000	APBD Kota		12 bulan	596.500.000

Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2021

2.7.2	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Set.DPRD	12 bulan	254.900.000	APBD Kota		12 bulan	178.900.000
2.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Set.DPRD	12 bulan	1.750.169.800	APBD Kota		12 bulan	1.957.449.800
2.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		601 unit	1.305.621.900	APBD Kota		601 unit	1.134.342.000
2.8.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Set.DPRD	5 unit	186.010.000	APBD Kota		5 unit	186.010.000
2.8.2	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Set.DPRD	3 unit	70.392.000	APBD Kota		3 unit	70.392.000
2.8.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Set.DPRD	354 unit	50.000.000	APBD Kota		354 unit	25.000.000
2.8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Set.DPRD	237 unit	374.279.900	APBD Kota		237 unit	328.000.000
2.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Set.DPRD	2 unit	624.940.000	APBD Kota		2 unit	524.940.000
2.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jangka waktu penyediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		12 bulan	26.453.216.530	APBD Kota		12 bulan	26.750.091.363
2.9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan DPRD	Set.DPRD	12 bulan	26.146.556.530	APBD Kota		12 bulan	26.443.441.363

Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2021

2.9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD	Set.DPRD	225 stel	189.000.000	APBD Kota		225 stel	189.000.000
2.9.3	Felaksanaan Medical Chek up	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti medical check up	Set.DPRD	45 orang	117.650.000	APBD Kota		45 orang	117.650.000
2.10	Layanan Administrasi DPRD	Jangka waktu penyediaan layanan administrasi DPRD		12 bulan	522.400.000	APBD Kota		12 bulan	443.400.000
2.10.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jangka waktu penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Set.DPRD	12 bulan	522.400.000	APBD Kota		12 bulan	443.400.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

Rencana kerja dan pendanaan berisi program, kegiatan, lokasi, hasil program dan target, masukan kegiatan dan target, keluaran kegiatan dan target, hasil kegiatan dan target, serta pagu indikatif tahun anggaran 2021, sebagai cara untuk melaksanakan dan mengukur capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kebijakan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak diselaraskan dengan perkembangan Kota Pontianak secara umum. Sedangkan kinerja yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan terhadap pelaksanaan tri Fungsi DPRD (Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan) merupakan prioritas kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Secara rinci Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK
TAHUN 2021**

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	2021			
						K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7			
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen program pembentukan peraturan daerah	1 Dokumen	2.235.000		
				Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah rancangan perda yang dibahas	10 raperda	11.009.000		
				Penyelenggaraan Kajian Perancang-Undanguan	Jumlah rancangan perda yang dikaji	5 raperda	80.859.000		
				Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik yang disusun	2 dokumen	334.078.000		
				Penyusunan Tata Tertib DPFD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang dievaluasi	1 dokumen	3.719.900		
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	1 dokumen	3.340.000
						pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	1 dokumen	3.340.000
						Pembahasan APBD	Jumlah dokumen APBD	1 dokumen	4.110.000
						Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen APBD Perubahan	1 dokumen	3.340.000
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	3.340.000

Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2021

1	2	3	4	5	6	7		
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat komisi I	60 kali	10.710.000	
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat komisi II	60 kali	10.710.000	
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat komisi IV	60 kali	10.710.000	
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah rapat Komisi III	60 kali	10.710.000	
				Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa	Jumlah rapat pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI	1 kali	2.955.000	
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala	Jumlah rapat Pansus LKPJ yang dilaksanakan	20 kali	11.310.000	
	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler dan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	Orientasi DPRD	Jumlah kegiatan orientasi DPRD	0	-	
				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	6 kegiatan	2.144.835.000	
					Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jangka waktu fasilitasi publikasi dan dokumentasi dewan	12 bulan	465.000.000
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan	7 orang	294.000.000
					Penyelenggaraan hubungan masyarakat	Jumlah kegiatan hearing/ dialog	0	-
				Jumlah dokumen perencanaan DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja DPRD	1 dokumen	6.540.000

Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2021

1	2	3	4	5	6	7	
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	0	-
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD	1 dokumen	3.340.000
				Pelaksanaan Feses	Jumlah kegiatan reses	3 kegiatan	4.104.160.000
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan kode etik	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD yang dievaluasi	1 dokumen	3.719.900
				Pengawasan kode etik DPRD	Jumlah rapat badan kehormatan yang difasilitasi	12 kali	32.250.000
		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas DPRD yang difasilitasi	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi	12 kegiatan	4.703.910.000
				Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah fasilitasi tugas pimpinan DPRD	20 kegiatan	1.104.222.000
			Persentase capaian kinerja DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD	1 dokumen	130.020.000
				Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Jumlah rapat banmus yang difasilitasi	12 kali	44.760.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bagian terhadap pelayanan perencanaan dan keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	2.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	4 dokumen	2.758.000
			Jumlah dokumen laporan penganggaran perangkat daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA-SKPD yang disusun	0	-

Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2021

1	2	3	4	5	6	7	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	0	-
			Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	3.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	6.412.874.833
				Pelaksanaan Fenatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	560.683.500
				Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola/disiapkan	0	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 dokumen	1.379.000
			Persentase penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	57.200.000
	Persentase tingkat kepuasan bagian terhadap pelayanan umum	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun	0	-
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diasuransikan	5 unit	56.000.000
				Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	0	-

**Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2021**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	74 stel	46.000.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal	5 orang	105.300.800
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	74.400.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	152.740.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	201.600.000
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	867.350.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	136.840.000
				Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	3000 orang	347.750.000
			Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	75.798.600
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan	259.275.600

**Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2021**

1	2	3	4	5	6	7	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	12 unit	49.340.000
				Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	27 unit	812.660.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 bulan	496.500.000
				Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	254.900.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	1.750.169.800
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	5 unit	186.010.000
				Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	3 unit	70.392.000
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	354 unit	50.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	237 unit	374.279.900
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	624.940.000

Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD Kota Pontianak
Tahun 2021

1	2	3	4	5	6	7	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jangka waktu. penyediaan layanan keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan DPRD	12 bulan	26.146.566.530
			Jangka waktu. penyediaan layanan kesejahteraan DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD	225 stel	189.000.000
				Pelaksanaan Medical Chek up	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti medical check up	45 orang	117.650.000
		Layanan Administrasi DPRD	Jangka waktu. penyediaan layanan administrasi DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jangka waktu penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	12 bulan	522.400.000

BAB V PENUTUP

Rencana kerja ini dimaksudkan sebagai penggambaran proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari seluruh Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 secara umum. Dokumen ini memuat Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan.

Demikian Renja Sekretariat DPRD Kota Pontianak disusun untuk menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai visi dan misi daerah 5 (lima) tahun kedepan.